

**RENCANA KERJA
PERANGKATDAERAH
RENJA (PD)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS**
Jl. Gatot Subroto Kampung Baru
Kecamatan Kotaagung Timur
Telp. Fax 0722. 22330



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur
Telp.Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 050/228.a/30/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.295/42/08/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 95);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 120);
40. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);
41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 934);
42. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.295/42/08/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. BAB V : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	48
3.3. Program dan Kegiatan	50
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
53	
 PENUTUP	 62

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan curahan Rahmat dan Ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 yang selanjutnya dilakukan Sinkronisasi dengan Rencana Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026.

Dengan demikian diharapkan bahwa program kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah Program Kegiatan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya kami berharap semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 yang kami susun dapat berjalan dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat dalam kegiatan Pembangunan yang akan datang.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**

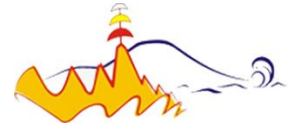


Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD.....	I
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.....	II
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanggamus.....	III
Tabel 4	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tanggamus.....	IV
Tabel 5	Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi Kabupaten Tanggamus.....	V
Tabel 6	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Dan Prakiraan Maju Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Kabupaten	VI
Tabel 7	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD Dan Prakiraan Maju Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Provinsi.....	VII
Tabel 8	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan PD DanPrakiraan Maju Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBN.....	VIII
Tabel 9	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Dan Prakiraan Maju Kabupaten Tanggamus.....	IX

BAB I



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Pembangunan nasional dan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Propinsi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus merupakan bagian dari pembangunan ekonomi daerah dan nasional yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial serta penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan kemajuan pembangunan yang dicapai, disadari pula bahwa keberhasilan pembangunan ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan, diantaranya masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, banyaknya pengangguran keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan yang belum terjangkau oleh proses pembangunan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberikan kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata.

Sasaran utama program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non fisik, dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Meskipun pembangunan secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat di dalam pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan benegara, serta perubahan-perubahan di tatanan regional dan global, perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Permasalahan pembangunan bidang sosial ke depan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, banyaknya keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana.

Diperlukan penyikapan secara terfokus, professional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan pokok indikator kinerja dan dukungan sumber yang lebih jelas, agar hasil nyata pembangunan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terhitung kontribusiiiya di dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan masalah sosial serta tantangan dan kemampuan penanganan yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus memandang perlu dilakukan perencanaan jauh kedepan sekaligus sebagai bentuk antisipasi menghadapi tantangan, ancaman serta peluang yang mungkin terjadi. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan dijabarkan ke dalam program-program yang aplikatif sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama satu tahun ke depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menetapkan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam bentuk arahan, pedoman, berbagai kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Misi tersebut selanjutnya disusun Program Prioritas Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 934);
42. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.295/42/08/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah menetapkan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, LSM, dunia usaha dan masyarakat agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis.

B. TUJUAN

1. Menetapkan Visi dan Misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai oleh pelaksana tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2. Menetapkan strategis dan arah kebijakan landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi.
3. Menetapkan program kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran tujuan visi dan misi.
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.
5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan evaluasi, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Daftar Isi**
- 3. Daftar Tabel**
- 4. Bab-Bab yang terdiri dari :**

A. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

B. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra-PD
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

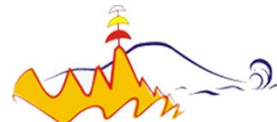
C. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

D. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

E. Penutup

BAB II



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berupa :

- Pemantapan upaya persiapan pelaksanaan bantuan untuk masyarakat miskin, upaya pendampingan, dan penyiapan kelompok-kelompok Usaha Bersama.
- Peningkatan kualitas permukiman masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup warga miskin.
- Pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan secara berkelanjutan Upaya yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah yaitu pemantapan fungsi masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kemasyarakatan serta pemanfaatan kawasan budi daya secara optimal dan melibatkan peran serta masyarakat yang saling menguntungkan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan
- Peningkatan kemampuan produksi masyarakat, hal ini perlu di tempuh dengan pengembangan penerapannya di Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan nilai tambah produksi serta dengan meningkatkan fasilitas permodalan dan akses masyarakat terhadap modal dengan mengembangkan Kelompok Usaha Bersama.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan 7 Program dan 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan dana sebesar Rp. 3.212.626.249, realisasi sebesar Rp. 2.997.541.905,- atau sebesar 93,31%.

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 990.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.430.000,- atau sebesar 40,74%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.549.400,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.580.000,- atau sebesar 98,81%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.520.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.361.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.361.000,- atau sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp 2.040.000,- atau sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 18 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.124.300,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.124.300,- atau sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.935.500,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 5.544.300,- atau sebesar 95,30%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.076.957.627,- dari dana yang tersedia sebesar Rp 2.131.453.102,- atau sebesar 97,44%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 405.630.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 422.130.000,- atau sebesar 96,09%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.840.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 63.240.000,- atau sebesar 96,20%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 5 Buku dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.410.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.410.000,- atau sebesar 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.502.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 4.132.000,- atau sebesar 84,75%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 550 Kotak dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.514.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.600.000,- atau sebesar 88,69%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 450 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.835.300,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.723.300,- atau sebesar 90,87 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.554.399,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 10.662.247,- atau sebesar 89,61%.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 100 Kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.204.456,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 49.028.000,- atau sebesar 82%.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.734.658,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 54.780.000,- atau sebesar 70,71%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.447.200,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 4.269.200,- atau sebesar 80,75%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.015.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 32.906.000,- atau sebesar 85,14%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 6 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 65.784.810,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 86.402.400,- atau sebesar 76,14%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 18 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.220.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 6.250.000,- atau sebesar 99,52%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar 5.400.000,- atau sebesar 100%.

- 2) Program Pemberdayaan Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 30 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.510.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 66.140.500 atau sebesar 89,73%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.010.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 11.700.500,- atau sebesar 94,10%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 130 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.850.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 26.365.500,- atau sebesar 56,32%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.608.000,- atau sebesar 0%.

- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 5 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.770.000,- atau sebesar 54,15%.
- 4) Program Program Rehabilitasi Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 31 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.010.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 25.807.200,- atau sebesar 81,41%.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan dan Rujukan, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 8 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 10.967.500,- atau sebesar 0%.
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 1 LS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 10 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.402.000,- atau sebesar 0%.
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 12 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 38.709.500,- atau sebesar 69,75%.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.512.550,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 24.852.500,- atau sebesar 82,54%.
- 6) Program Penanganan Bencana dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Penyediaan Makanan, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 200 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.791.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 82.791.000,- atau sebesar 83,09%.
 - Sub Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 50 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.750.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.750.000,- atau sebesar 100%.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 55 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.432.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 30.432.000,- atau sebesar 100%.
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kotadengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, pencapaian kinerja Tahun 2024 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.666.105,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 21.322.600,- atau sebesar 64,09%.

A. Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun lalu tidak ada.

B. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun lalu tidak ada.

C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun lalu tidak ada.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka tidak ada factor penyebab tidak tercapainya Program/Kegiatan.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Bahwa program Dinas Sosial Tanggamus dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada program Renstra PD.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Melakukan pematangan perhitungan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Untuk dapat mengetahui hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1.		REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS													
		Nama PD : Dinas Sosial													
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan								
1	06	01	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu								
1	06	01	2	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	06	01	2	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	06	01	2	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	06	01	2	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	06	01	2	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	06	01	2	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 :aporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)	
1	06	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	60 Laporan	100%
1	06	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu								100%
1	06	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	75 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	75 Orang	100%
1	06	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	75 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	75 Orang	100%
1	06	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	100%
1	06	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	100%
1	06	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik								
1	06	01	2.1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
1	06	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik								
1	06	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)		(11) = (10 / 4)
1	06	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1	06	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1	06	01	2.1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1	06	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	300 Laporan	100%
1	06	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%
1	06	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
1	06	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
1	06	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%
1	06	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
1	06	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)	
1	06	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	25 Unit	51 Unit	57%
1	06	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								
1	06	02	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								
1	06	02	2	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90 Orang	100%
1	06	02	2	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang	22 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	62 Orang	90%
1	06	02	2	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	100%	130 Orang	390 Orang	100%
1	06	02	2	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	60 Orang	100%
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
1	06	03	2		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.								
1	06	03	2	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	30 Orang	100%
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang direhabilitasi								
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	200 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	470 Orang	695 Orang	57.92%
1	06	04	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	528 Orang	528 Orang	53%
1	06	04	2	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	72 Orang	72 Orang	36%
1	06	04	2	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	7 Orang	7 Orang	14%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
1	06	04	2	05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%
1	06	04	2	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	207 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	100 Orang	100 Orang	48%
1	06	04	2	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	207 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	06	04	2	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	207 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	06	04	2	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	30 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	15 Orang	50%
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
1	06	04	2	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	%	0 Orang	20 Orang	27%
1	06	04	2	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	87 Orang	50 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	57%
1	06	04	2	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	50 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	57%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
1	06	04	2	07										
1	06	04	2	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	10 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	10 Orang	18%
1	06	04	2	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	53 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	0%	25 Orang	40 Orang	75%
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial								
1	06	05	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1	06	05	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	350 Keluarga	12 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	0%	100 Keluarga	212 Keluarga	61%
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani								
1	06	06	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
1	06	06	2	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	100 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	250 Orang	325 Orang	72%
1	06	06	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)	
1	06	06	2	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	17%
1	06	06	2	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	50%
1	06	06	2	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	60%
1	06	06	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota								
1	06	06	2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	180 Orang	57 Orang	55 Orang	55 Orang	100%	55 Orang	167 Orang	93%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara								
1	06	07	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								
1	06	07	2	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 Makam	3 Makam	100%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (15 Peraturan K/LPNK). Maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yakni memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dapat dilihat pada table 2.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah pemangku pelayanan kepada masyarakat yang di evaluasi dan dinilai oleh Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Umbusbman dengan total Nilai Kepatuhan Tahun 2024 dengan 93,51 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan rincian sebagai berikut :

DIMENSI INPUT :

1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2	3	4		
1	Pengetahuan tentang Komponen Standar Pelayanan	12.22	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman tentang Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	100	100	100	100	95	
3	Pengetahuan tentang Lembaga Ombudsman	4.58	100	100	100	80	89	
4	pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang bentuk-bentuk maladmisistrasi
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombusman	4.58	100	100	100	100	95	
6	Pengetahuan tentang pelayanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	80	80	100	40	69	untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
Kompetensi Pelaksana		38.20	97.99	89.19	100	82.77	87.27	

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Keterangan
1	Frekuensi pengawasan Internal	8.06	100	
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	80	Untuk ketersediaan jumlah petugas agar disesuaikan dengan kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	100	
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100	
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	80	Agar menyesuaikan untuk ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100	
7	ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100	
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100	
9	Ketersediaan Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	100	
Sarana Prasarana		61.80	95.53	

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2		
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100	
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100	
3	Ketersediaan Jangka Waktu penyelesaian	10.66	100	100	100	
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100	
5	Ketersediaan Produk pelayanan	9.00	100	100	100	
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100	
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	100	100	100	
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60	
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	100	100	100	
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100	
11	Ketersediaan Atribut	7.96	60	60	60	Untuk dilengkapi ketersediaan atribut untuk Petugas layanan
12	Ketersediaan Pelayanan terpadu	12.78	80	80	80	Untuk Pelayanan terpadu agar ditingkatkan
Standar Pelayanan		100.00	91.08	91.08	91.08	

Produk Layanan	
1	Pelayanan Bantuan Bencana
2	Rekomendasi BPJS/KIS APBD

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
1	Penundaan berlarut	1.60	100.00	1	4
2	Permintaan imbalan	18.40	100.00		
3	Penyimpangan Prosedur	18.40	100.00		
4	Tidak Kompeten	14.40	100.00		
5	Tidak Patut	12.00	100.00		
Standar Pelayanan		80.00	91.08		

MENSI OUTPUT

2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM	20.00	60
SPM/IKM		20.00	60.00

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pemngelolaan pengaduan	27.34	100
	Penyelenggara Pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	100
	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	100
	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	100
	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
1	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	100.00

Hasil Penilaian (%)	Skala
100	5
80	4
60	3
40	2
20	1
10	0

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan tingkat Provinsi dan Pusat, serta telah memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagaimana Perangkat Daerah dapat memenuhi keinginan pencari kerja, serta masyarakat yang memerlukan bantuan sosial
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain SDM belum melaksanakan program kerja dengan sungguh-sungguh, sarana prasarana kurang mendukung, serta minimnya anggaran untuk biaya kegiatan sehingga kurangnya pemerataan dalam pelaksanaan dilapangan sehingga program tidak dapat berjalan secara optimal.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) adalah kurang lancarnya informasi sehingga masih banyak program kegiatan belum tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh PD, serta pencapaian Visi dan Misi akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau hambatan.
4. Tantang dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dibidang Sosial adalah :
 - Tantangan SDM belum mengerjakan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan program dengan sungguh-sungguh
 - Anggaran kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan.Peluang yang ada adalah :
 - Meningkatkan SDM dengan mengikuti diklat-diklat
 - Penambahan insentif
 - Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
 - Penambahan anggaran.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:
 - Selalu melakukan pendekatan dengan urusan sosial serta yang menyangkut masalah ketenagakerjaan agar dapat diajak bekerjasama sehingga tugas, fungsi pokok PD dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya
 - Meningkatkan sarana dan prasarana
 - Penambahan anggaran/dana.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yakni perlu adanya sumber data pendukung yang tepat dan akurat.
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yakni untuk mengakuratkan data, atau memvalidkan data.
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada tabel 3

Tabel 3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100%	3,492,319,483	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100%	2,980,311,832	
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	100%	23,509,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	100%	23,509,800	
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	3,423,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	3,423,500	
1	06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4,585,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4,585,000	
1	06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	3,443,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	3,443,000	
1	06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	3,072,500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	3,072,500	
1	06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2,963,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	2,963,000	
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	2 Laporan	2,078,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	2 Laporan	2,078,300	
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	4 Laporan	3,944,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	4 Laporan	3,944,500	
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	3,031,077,534.83	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	2,519,069,884.23	
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	2,542,181,184.83	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	2,456,779,784.23	
1	06	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	426,606,250	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Orang	-	
1	06	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	60,840,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	60,840,000	
1	06	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1,450,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1,450,100	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	10,316,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	10,316,000	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,316,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,316,000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	162,606,548	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	162,606,548	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	27,088,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	27,088,000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	11,100,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	11,100,000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotaagung Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	8,506,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotaagung Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	8,506,400	
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	15,858,148	Penyediaan Bahan/Material	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	15,858,148	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Laporan	100,054,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Laporan	100,054,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,978,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,978,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	45,570,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	45,570,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	31,408,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	31,408,000	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187,831,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187,831,600	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	44,170,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	44,170,000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	127,541,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	127,541,600	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	8 Unit	4,910,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	8 Unit	4,910,000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	11,210,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	11,210,000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100,746,800	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100,746,800	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,746,800	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,746,800	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	21,273,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	21,273,500	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	60,048,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	60,048,000	
1	06	02	2.03	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	19,425,300	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	19,425,300	
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	2,770,000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	2,770,000	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	2,770,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	2,770,000	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	5 Orang	2,770,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	5 Orang	2,770,000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS yang direhabilitasi	100%	311,363,300	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100%	311,363,300	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	223,325,800	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	223,325,800	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	474 Orang	81,155,000	Penyediaan Permakanan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	470 Orang	81,155,000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	45,445,000	Penyediaan Sandang	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	45,445,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	57,902,400	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	57,902,400	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	12,075,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	12,075,000	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	9,963,400	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	9,963,400	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	6,900,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	6,900,000	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	5 Orang	9,885,000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	5 Orang	9,885,000	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	88,037,500	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	88,037,500	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	27 Dokumen	88,037,500	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	27 Dokumen	88,037,500	
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	224,822,000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	224,822,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	224,822,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	224,822,000	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	27,020,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	27,020,000	
1	06	05	2.02	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	102,520,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	102,520,000	
1	06	05	2.02	08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	95,282,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	95,282,000	
1	06	06			Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100%	427,564,900	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100%	427,564,900	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	361,883,100	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	361,883,100	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	122,683,100	Penyediaan Makanan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	122,683,100	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	93,490,000	Penyediaan Sandang	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	93,490,000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	06	06	2.01	03	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	76,000,000		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	76,000,000	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25,690,000		Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25,690,000	
1	06	06	2.01	07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	44,020,000		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	44,020,000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	65,681,800		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	65,681,800	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	65,681,800		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	65,681,800	
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	15,290,100		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	15,290,100	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	15,290,100		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	15,290,100	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	15,290,100		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	15,290,100	
									4,574,876,582.83						4,062,868,932.23	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Kajian Usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari data pendukung kegiatan, yang kita peroleh dari hasil pendataan baik urusan sosial sehingga program kegiatan dapat kita laksanakan.
- 2) Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang membidangi Urusan Sosial.

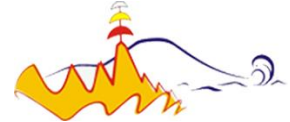
Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada tabel 4

Tabel 4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

NO	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan *)
06	Sosial				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	

BAB III



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik

Gambar III.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2026



Keterangan: *) Lima Direktif Presiden

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar III.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2026



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2025

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tabel III.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% _{yoy}): Akhir Periode	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900 ^a
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01-171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2-6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(1,04)-(0,90)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18-21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6-4,7
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00-24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22-13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45-11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)-(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)-(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8-39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17-7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3-2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4-1.006,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah), a: Hasil rapat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 6 Mei 2025

Keterangan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negative.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80-6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan agar berjalan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan produktif. Demokrasi sebagai sistem politik Indonesia perlu terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya dari procedural menuju arah substansial dengan menjamin kebebasan dan kesetaraan untuk mendorong keterbukaan akses bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperoleh sumber daya di berbagai sektor. Demokrasi yang berkualitas menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kelompok rentan. Hal ini diupayakan melalui penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Penataan dan penguatan sistem komunikasi publik dan media diperlukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tingkat kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi yang transparan dan akuntabel dapat mencegah misinformasi (hoax), dan mendukung kebijakan publik menjadi lebih efektif serta diterima oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, sistem komunikasi publik dan media juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital dan menyasar pada seluruh komponen masyarakat.

Dalam kehidupan berdemokrasi, media massa memiliki peranan penting sebagai kanal informasi, media literasi, pengawas kebijakan, serta bentuk transparansi pemerintah bagi masyarakat luas. Transformasi digital pada dunia pers dan media merupakan inovasi penting dalam menjamin kebebasan pers yang berintegritas dan berkelanjutan, serta sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, serta Bertanggungjawab, Edukatif, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S), yang selanjutnya berdampak pada independensi dan keberlanjutan dunia pers dan media di masa depan.

Fondasi pembangunan harus sejalan dengan pengarusutamaan HAM, agar setiap individu memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan inklusif, perlindungan HAM, serta penghapusan diskriminasi. Dengan integrasi nilai Pancasila, penguatan demokrasi, dan HAM, RKP Tahun 2026 memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terselenggara secara inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif, dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Tabel III.3 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM				
1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾	79,51 (2023)	81,69 - 85,23	82,12 - 85,66
2	Indeks HAM ²⁾	2,70 (2023)	2,75	2,80

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; dan 2) Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan, melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

Penguatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan postur pertahanan, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan berbasis teknologi, serta optimalisasi komponen cadangan dan komponen pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan nasional. Sementara kemandirian di sektor strategis difokuskan

pada kebijakan pangan, energi, dan air dengan mengadopsi pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) secara berkelanjutan. Kemandirian juga dibangun berbasis Ekonomi Pancasila dengan prinsip pertama untuk memperkuat ekonomi yang religius dan sekaligus berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini dilaksanakan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kemandirian perekonomian juga dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pelaksanaannya diwujudkan melalui pengembangan ekonomi digital, hijau dan biru.

Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, seperti pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), penguatan transisi energi berkeadilan, penguatan ekonomi dan industri digital, serta perluasan kontribusi ekonomi hijau dan biru. Regulasi dan kelembagaan juga diperkuat untuk memastikan koordinasi dan integrasi di setiap sektor berjalan efektif, untuk mencapai kemandirian dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026.

Tabel III.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan				
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16,0	17,0
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic</i>	65,6	65,7	65,8
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,80 (2020)	67,50	68,00
4	<i>Global Cybersecurity Index</i>	100	100	95
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	61

Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	75,4
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,67	3,16	3,33
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,27	7,21	6,55
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
9	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,82
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^{b)}	14,68	20,00	20,00
Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (<i>FEW Nexus</i>)				
11	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,50
12	Kapasitas Tampungan Air (m ³ /kapita) ^{b)}	59,59	59,31	60,16
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24,00 (2020)	39,20	42,24
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,25	12,50	17,00
15	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	3 (2023)	3	2
16	<i>Indonesia Blue Economy Index</i> (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	41,26
17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	43	41
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
18	Indeks Ekonomi Hijau	60,37 (2023)	68,34	71,01
19	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	52,64 (2023)	58,00	60,00
20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	28 (17 terdaur ulang)
21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,47 (2023)	18,37	19,07
22	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) ^{b)}	28,53 (2023)	26,67	27,35
23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,47
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,53 (2024)	76,49	76,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Keterangan: a) sementara; b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui (i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi.

Meningkatkan Kemandirian Bangsa menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan FEW Nexus Kemandirian bangsa menuju swasembada pangan, energi dan air yang berkualitas dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui:

Pangan

(i) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (blue food); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.

Energi

(i) peningkatan penyediaan energi; (ii) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; serta (iii) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.

Air

(i) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (ii) konservasi sumber daya air; (iii) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; (iv) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation); serta (v) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Ekonomi Syariah

Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah.

Ekonomi Digital

Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Ekonomi Biru

Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru.

Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

Memperluas pelaksanaan transformasi ekonomi hijau yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari.

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Dalam upaya ini, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pengembangan konektivitas multimoda dan layanan digital, serta transisi energi listrik ramah lingkungan yang tidak hanya memperlancar distribusi pangan dan energi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan. Pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan akan didorong untuk menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi ekonomi daerah. Selain itu, pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan aset sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan memperkuat pembiayaan sektor strategis, termasuk pertanian, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing juga didorong melalui peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong kewirausahaan. Peningkatan peran aktif koperasi dilakukan sebagai upaya strategis dalam mengintegrasikan petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya ke dalam ekosistem produksi yang lebih modern dan efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif.

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, sasaran pembangunan tahun 2026.

Tabel III.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,00 (2019)	46,50	47,00
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	169,10	188,50	188,04
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,21	66,90	64,51
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	6,81	8,00	7,63
5	Aset Asuransi/PDB (%) ^a	8,93	9,10	9,30
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,72	57,80	59,90
7	Total Kredit/PDB (%)	35,35	37,80	38,46
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70 (2023)	91,00	91,50
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50 ^b	35,00	37,95
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,97	1,10	1,12
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,15
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,18
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,72 (2022)	4,20-4,30	4,60-4,70
14	Devisa Pariwisata (miliar USD)	16,71	17,10-18,30	22,00-24,70
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,30-7,90	7,40-8,00

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib; b) Angka Realisasi 2024 Sakernas Agustus 2024 (BPS)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.

3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan social dan ekonomi.

Meskipun kinerja pembangunan manusia menunjukkan tren positif, upaya akseleratif masih diperlukan untuk mencapai target peningkatan produktivitas pada tahun 2026. SDM yang terampil, berdaya saing, dan memiliki karakter unggul diperlukan untuk menjawab tantangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Keberhasilan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas pada tahun 2026 diwujudkan melalui lima sasaran utama.

Tabel III.6 Sasran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,45
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,36
3	Rata-rata Nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022) ³⁾	396	396
	(b) Matematika	366 (2022) ³⁾	404	404
	(c) Sains	383 (2022) ³⁾	416	416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	63,06	64,89	65,89
	Numerasi	55,92	57,36	58,86
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	32,00 ²⁾	33,94	34,92
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,20 ²⁾	11,11	11,49
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,14 ²⁾	68,32	68,50

Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,39 ²⁾	74,43	74,68
2	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,11 ⁴⁾	2,10	2,10
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{c)}	189 (2020) ²⁾	122	109
4	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) ^{c)}	21,50 (2023) ⁵⁾	18,80	17,50
5	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ^{c)}	387 (2023) ⁶⁾	329	252
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) ^{c)}	98,42 ⁷⁾	98,60	98,70
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	73,83
2	Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19	72,33
3	Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16	67,24
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,421 ²⁾	0,430	0,421
5	Indeks Pembangunan Gender	91,85 ²⁾	92,02–92,11	92,11–92,21
6	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94,00	94,50
7	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69,00	69,50
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	52

2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,44–4,96
3	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,30	0,31
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,30–58,80	56,40–59,31
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
1	Peringkat pada Asian Games	13 (2023) ⁸⁾	– d)	9–11 ⁸⁾
2	Peringkat pada Asian Para Games	6 (2023) ⁹⁾	– d)	5–7 ⁹⁾
3	Peringkat pada ASEAN Para Games	1 (2023) ¹⁰⁾	– d)	1–2 ¹⁰⁾
4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%)	9,04 (2023) ¹⁾	10,36–11,45	10,80–11,94 ¹⁾

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah);

Keterangan Sumber: 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN; 8) Olympic Council of Asia; 9) Asian Paralympic Committee; 10) ASEAN Para Sports Federation

Keterangan Indikator: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaruan konsep dan indikator penyusun; dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional; d) ajang olahraga tidak diagendakan pada tahun tersebut

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

Kesehatan untuk Semua

Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja

Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga.

Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber

Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, hilirisasi industri, termasuk yang berbasis sumber daya hayati, perlu diperkuat agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih berdaya saing. Dengan industri yang lebih efisien dan produktif, ketersediaan pangan dan energi serta produk olahan lainnya akan lebih stabil dan berkelanjutan. Produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi yang meningkat juga akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tidak hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor pendukung lainnya seperti jasa perdagangan, transportasi dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif dan berdaya saing, termasuk yang berbasis hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk memastikan industri tersebut dapat beroperasi secara optimal dan kompetitif, diperlukan kinerja logistik yang andal, efektif, dan efisien. Infrastruktur konektivitas yang memadai, seperti jaringan transportasi yang efisien serta sistem distribusi yang terintegrasi, sangat penting untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Selain itu, kinerja logistik yang andal dan merata juga akan mempercepat distribusi, memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk tersebut, serta membuka peluang usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026.

Tabel III.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,98 ^[a]	20,80	21,20
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
1	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	13,30
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,15 ^[a]	29,37	29,44
3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,2	21,7	22,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Keterangan Sumber: [a] BPS

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara.

**Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6**

Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial adaptif merupakan perlindungan sosial yang menjawab dinamika ekonomi nasional maupun global, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bencana. Perlindungan sosial yang responsif dan inklusif dicapai melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif sehingga sesuai dengan risiko, kerentanan, dan kedaruratan yang dihadapi seluruh penduduk. Perlindungan sosial termasuk didalamnya adalah rehabilitasi sosial, layanan sosial, dan perawatan yang diberikan kepada penduduk dengan kerentanan tertentu. Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan menargetkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mendukung upaya digitalisasi penyaluran bantuan dan program yang transparan dan efisien.

Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi dan memperhatikan daerah tertinggal dan kawasan afirmasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Untuk meningkatkan manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap seluruh masyarakat, penguatan bisnis melalui koperasi produksi menjadi salah satu prioritas.

Kota juga dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar dan bersifat inklusif. Pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, maupun layanan dan infrastruktur dasar lainnya. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diarahkan tidak menjadi pusat pemerintahan saja, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan wilayah sekitarnya. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, IKN dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa.

Tabel IV.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No.	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan				
1	Tingkat Kemiskinan (%)	8,57 ^[1]	7,0 - 8,10	6,5-7,5
2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) ^{c)}	1,47	0,50-1,00	0-0,50
3	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	17,13	17,50	18,20
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^{b)}	31,21	32,15	34,99
5	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	9,07 (2023)	10,00	10,40
Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,25	67,00	68,66
Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan				
1	Persentase Desa Mandiri (%)	22,85 ^{d)}	23,29	23,91 ^{d)}
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
1	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%) ^{a)}	56,56 (2022)	57,29	57,70
2	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%) ^{b)}	44,13 (2022)	44,35	44,58

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Keterangan Sumber: [1] SUSENAS

Keterangan: a) indikator mencakup Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan dan PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional; b) indikator termasuk dalam indikator RPJPN Tahun 2025-2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029; c) menggunakan US\$ 2,15 PPP tahun 2017; d) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.

Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sector prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kebijakan fiskal menjadi pilar utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola migrasi untuk mendukung perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan fiskal berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Stabilitas makroekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan nasional.

Sebagai pencipta nilai (value creator) dan agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan daya saing dan efisiensi dalam penugasan pemerintah. Peningkatan daya saing dan efisiensi BUMN dalam berbagai program strategis, termasuk swasembada energi dan pangan, akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Strategi ini juga didukung oleh Danantara, yang diarahkan untuk meningkatkan investasi serta meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan yang terpadu akan meningkatkan ketahanan sosial dan memastikan terwujudnya generasi produktif yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Melalui strategi ini, reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penguatan industry akan membentuk fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel III.9 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,70
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00 - 64,99	65,00 - 66,99
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98 ¹⁾	71,38	72,80 ¹⁾
2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba				
1	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%) ²⁾	1,73 (2023)	1,70	1,70 ²⁾
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
1	Return on Asset (RoA) BUMN	3,14 (2023)	3,21	3,26

Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
1	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,84	12,36	12,22-13,35
2	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24	10,45-11,40
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
1	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Keterangan Sumber: [a] Badan Narkotika Nasional

Keterangan: *)angka baseline dan target merupakan proyeksi nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan akan dimutakhirkan; **)angka target 2026 merupakan angka

Target 2025. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika dilakukan penghitungan 2 tahun sekali dengan rentang waktu penghitungan 2025, 2027, dan 2029.

Arah Kebijakan

Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan advokat generaal melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi.

Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) perlindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migrant Indonesia di luar negeri yang integratif.

Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tata Kelola BUMN yang Baik Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi

BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN.

Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selaras dengan itu, optimalisasi pemanfaatan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan perlu terus didorong antara lain dengan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah terbukti mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk dalam sistem pertanian berbasis ekologi, konservasi hutan, serta perlindungan ekosistem laut.

Tradisi keagamaan dan budaya juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pendekatan berbasis ekosistem dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana menjadi solusi adaptif dalam menghadapi ancaman lingkungan, seperti pengelolaan air, pertanian adaptif, serta perlindungan kawasan rawan bencana. Dalam hal ini, literasi kebencanaan melalui kurikulum pendidikan perlu dikembangkan agar masyarakat dapat adaptif terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, investasi di bidang pengurangan risiko bencana juga harus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana. Dengan memperkuat hubungan antara pembangunan ekonomi, ketahanan bencana dan lingkungan, serta warisan budaya dan nilai-nilai agama, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.

Tabel III.10 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	66,15
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	58,99
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	77,14
Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,136

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI PD DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

NO	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	APBN	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional-

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut

VISI	<i>“ Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas “</i>
MISI I	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
MISI II	Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing
MISI III	Memastikan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Ke Kota
MISI IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
MISI V	Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus melaksanakan misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing**. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Adalah **Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.

Tujuan dan Sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja utama yang ditargetkan setiap tahun dari tahun 2025 hingga 2030. Ini adalah bagian penting dari dokumen perencanaan strategis perangkat daerah (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Terdapat dua indikator utama, yaitu Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamu. Pada table di atas terlihat bahwa setiap tahunnya terdapat target peningkatan yang progresif pada kedua indikator. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pembangunan SDM ASN, adanya tolok ukur jelas untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan lembaga terkait, dan adanya keterkaitan erat antara kualitas ASN dan efektivitas pelayanan publik.

3.3 Program Dan Kegiatan

Pada Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan 7 Program, 14 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp 4.062.868.932,23,- yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tanggamus, yang dapat dilihat pada table 6 berikut ini :

Tabel 6. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN TANGGAMUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	-	100%	3,319,520,559		100%	2,980,311,832.23	-	-	-	100%	3,655,000,000
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	-	100%	17,419,800		100%	23,509,800	-	-	-	100%	33,000,000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,423,500	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,423,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	10 Dokumen	5,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,575,000	Kotaagung Timur	10 Dokumen	4,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	10 Dokumen	5,000,000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	Kotaagung Timur	10 Dokumen	2,433,000	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,443,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	10 Dokumen	5,000,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	10 Dokumen	2,062,500	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,072,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	10 Dokumen	5,000,000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	10 Dokumen	1,923,000	Kotaagung Timur	10 Dokumen	2,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	10 Dokumen	3,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Kotaagung Timur	18 Laporan	1,068,300	Kotaagung Timur	18 Laporan	2,078,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	18 Laporan	5,000,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKIPj	Kotaagung Timur	20 Laporan	2,934,500	Kotaagung Timur	20 Laporan	3,944,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	20 Laporan	5,000,000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	-	100%	2,867,324,312		100%	2,519,069,884.23	-	-	-	100%	3,075,000,000
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	25 Orang	2,373,607,962	Kotaagung Timur	25 Orang	2,456,779,784.23	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	25 Orang	2,500,000,000
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kotaagung Timur	23 Orang	429,026,250	Kotaagung Timur	23 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	23 Orang	500,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	Kotaagung Timur	12 Dokumen	63,240,000	Kotaagung Timur	12 Dokumen	60,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	12 Dokumen	70,000,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kotaagung Timur	5 Laporan	1,450,100	Kotaagung Timur	5 Laporan	1,450,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	5 Laporan	5,000,000
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	-	100%	10,316,000	-	100%	10,316,000	-	-	-		15,000,000
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kotaagung Timur	1 Unit	10,316,000	Kotaagung Timur	1 Unit	10,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kotaagung Timur	1 Unit	15,000,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	-	100%	155,395,847	-	100%	162,606,548	-	-	-	100%	220,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotaagung Timur	1 Paket	51,088,000	Kotaagung Timur	1 Paket	27,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Paket	60,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	Kotaagung Timur	1 Paket	11,100,000	Kotaagung Timur	1 Paket	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Paket	15,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	Kotaagung Timur	1 Paket	8,348,100	Kotaagung Timur	1 Paket	8,506,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Paket	10,000,000
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kotaagung Timur	1 Paket	13,081,747	Kotaagung Timur	1 Paket	15,858,148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Paket	15,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kotaagung Timur	50 Laporan	71,778,000	Kotaagung Timur	50 Laporan	100,054,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	100 Laporan	120,000,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	80,698,000		100%	76,978,000	-	-		100%	110,000,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotaagung Timur	12 Laporan	49,290,000	Kotaagung Timur	12 Laporan	45,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	12 Laporan	60,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kotaagung Timur	1 Laporan	31,408,000	Kotaagung Timur	1 Laporan	31,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Laporan	50,000,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	188,366,600		100%	187,831,600	-	-		100%	202,000,000
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	Kotaagung Timur	1 Unit	44,170,000	Kotaagung Timur	1 Unit	44,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Unit	50,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	Kotaagung Timur	6 Unit	127,541,600	Kotaagung Timur	6 Unit	127,541,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	6 Unit	130,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	Kotaagung Timur	8 Unit	5,520,000	Kotaagung Timur	8 Unit	4,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	25 Unit	7,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	Kotaagung Timur	1 Unit	11,135,000	Kotaagung Timur	1 Unit	11,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Unit	15,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	100%	47,821,800		100%	100,746,800	-	-	-	100%	60,000,000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	47,821,800		100%	100,746,800	-	-	-	100%	60,000,000
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	30 Orang	9,929,800	Kotaagung Timur	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	0 Orang	-
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Aktif	Kotaagung Timur	22 Orang	9,495,500	Kotaagung Timur	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	0 Orang	-
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	130 Orang	21,273,500	Kotaagung Timur	130 Orang	21,273,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	130 Orang	30,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	1 Lembaga	7,123,000	Kotaagung Timur	1 Lembaga	60,048,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	1 Lembaga	10,000,000
1	06	02	2.03	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kotaagung Timur	0 Orang	-	Kotaagung Timur	50 Orang	19,425,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	50 Orang	20,000,000
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	-	100%	2,770,000		100%	2,770,000	-	-		100%	5,000,000
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	-	100%	2,770,000		100%	2,770,000	-	-		100%	5,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	2,770,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	2,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	5,000,000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang direhabilitasi	-	100%	439,257,600		100%	311,363,300	-	-		100%	463,000,000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	100%	308,048,100		100%	223,325,800	-	-		100%	313,000,000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474 Orang	81,155,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	474 Orang	81,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	100,000,000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Paksiain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528 Orang	45,445,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528 Orang	45,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	50,000,000
2	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang	63,157,200	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	57,902,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Orang	70,000,000
3	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	12,075,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	12,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	15,000,000
4	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	44,535,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	40,000,000
5	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	37,963,400	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	9,963,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	10,000,000
6	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	6,900,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	8,000,000
7	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	6,900,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Orang	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	10,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	9,917,500	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	9,885,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	10,000,000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	100%	131,209,500		100%	88,037,500	-	-		100%	150,000,000
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	42,000,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50,000,000
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Dokumen	89,209,500	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Dokumen	88,037,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	100,000,000
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	100%	103,828,000		100%	224,822,000	-	-		100%	280,000,000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	103,828,000		100%	224,822,000	-	-		100%	280,000,000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	27,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	40,000,000
1	06	05	2.02	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	102,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	120,000,000
1	06	05	2.02	08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	12 Bulan	103,828,000	Kotaagung Timur	12 Bulan	95,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	12 Bulan	120,000,000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	-	100%	490,282,800		100%	427,564,900	-	-		100%	565,000,000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	100%	459,850,800		100%	361,883,100	-	-		100%	530,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	157,675,800	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	122,683,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	200,000,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	127,465,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	93,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	150,000,000
1	06	06	2.01	03	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	105,000,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100,000,000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	25,690,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	25,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	30,000,000
1	06	06	2.01	07	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	44,020,000	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	44,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	50,000,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	100%	30,432,000	-	100%	65,681,800	-	-		100%	35,000,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kotaagung Timur	55 Orang	30,432,000	Kotaagung Timur	55 Orang	65,681,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	55 Orang	35,000,000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-	100%	15,322,600	-	100%	15,290,100	-	-		100%	20,000,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	100%	15,322,600	-	100%	15,290,100	-	-		100%	20,000,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	12 Bulan	15,322,600	Kotaagung Timur	12 Bulan	15,290,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Kotaagung Timur	12 Bulan	20,000,000
JUMLAH									4,418,803,359			4,062,868,932.23					5,048,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2025			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Rencana Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Provinsi Lampung disajikan dalam Tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN TANGGAMUS
SUMBER DANA APBD PROVINSI**

Nama PD : Dinas Sosial

[illegible]

Rencana Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBN disajikan dalam Tabel 8 berikut ini :

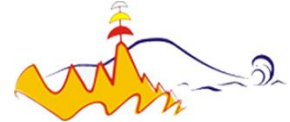
Tabel 8. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN TANGGAMUS

SUMBER DANA APBN

Nama PD : Dinas Sosial

[illegible]

BAB IV



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.423.500,-.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.585.000,-.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 10 Eksemplar dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.443.000,-.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.072.500,-.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 10 Eksemplar dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.963.000,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 2 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.078.300,-.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 20 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.944.500,-.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 25 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.456.779.784,23
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 60.840.000,-.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 5 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.450.100,-.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD , pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 10.316.000,- .
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Paket dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 27.088.000,- .
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Paket dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.100.000,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Paket dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 8.506.400,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Paket dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15.858.148,-.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 100 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.054.000,-.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 12 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 45.570.000,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Laporan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 31.408.000,-.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 44.170.000,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 6 Unit, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 127.541.600,-.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 8 Unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 4.910.000,-.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 1 Unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 11.210.000,-

- 2) Program Pemberdayaan Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 130 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 21.273.500,-
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 3 Lembaga dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 60.048.000,-
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 50 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 19.425.300,-
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 10 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.770.000,- .

4) Program Program Rehabilitasi Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 9 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 474 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 81.155.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 528 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 45.445.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 70 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 57.902.400,-
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 7 Orang dengan realisasi kebutuhan sebesar Rp. 12.075.000,-
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 100 Orang dengan realisasi kebutuhan sebesar Rp. 9.963.400,-
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 4 Orang dengan realisasi kebutuhan sebesar Rp. 6.900.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 5 Orang dengan realisasi kebutuhan sebesar Rp. 9.885.000,-
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 22 Dokumen dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 88.037.500,-.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 5 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 27.020.000,-.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 5 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 102.520.000,-.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 12 Bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 95.282.000,-.

- 6) Program Penanganan Bencana dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Penyediaan Makanan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , target kinerja sebesar 250 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 122.683.100,-.
 - Sub Penyediaan Sandang, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , target kinerja sebesar 150 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 93.490.000,-.
 - Sub Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , target kinerja sebesar 1 Unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 44.020.000,-.
 - Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 100 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 76.000.000,-.
 - Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, target kinerja sebesar 30 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 25.690.000,-.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus target kinerja sebesar 55 Orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 65.681.800,-.

- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kotadengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur, target kinerja sebesar 12 Bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15.290.100,-.

Untuk lebih jelasnya rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah diuraikan atau disajikan pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100%	2,980,311,832.23	3,655,000,000			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	100%	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	100%	23,509,800	33,000,000			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	3,423,500	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4,585,000	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	3,443,000	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	3,072,500	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	10 Dokumen	2,963,000	3,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	18 Laporan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	18 Laporan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	18 Laporan	2,078,300	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	20 Laporan	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	20 Laporan	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	20 Laporan	3,944,500	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	2,519,069,884.23	3,075,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	25 Orang	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	2,456,779,784.23	2,500,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	23 Orang	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	-	500,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	12 Dokumen	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	60,840,000	70,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	5 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1,450,100	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	10,316,000	15,000,000			
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Unit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Unit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Unit	10,316,000	15,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	100%	162,606,548	220,000,000			
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	27,088,000	60,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	11,100,000	15,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	8,506,400	10,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	15,858,148	15,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	50 Laporan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Laporan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Laporan	100,054,000	120,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,978,000	110,000,000			
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	45,570,000	60,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	31,408,000	50,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187,831,600	202,000,000			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	44,170,000	50,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	127,541,600	130,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	8 Unit	4,910,000	7,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	11,210,000	15,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					100%	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100,746,800	60,000,000			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					100%	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100,746,800	60,000,000			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	-	-	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Aktif	0 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Aktif	0 Orang	-	-	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	130 Orang	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 Orang	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	130 Orang	21,273,500	30,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3 Lembaga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Lembaga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Lembaga	60,048,000	10,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	14	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	50 Orang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang	50 Orang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang	50 Orang	19,425,300	20,000,000			
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	2,770,000	5,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarikasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					100%	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarikasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarikasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	2,770,000	5,000,000			
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarikasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	5 Orang	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarikasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	5 Orang	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarikasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	5 Orang	2,770,000	5,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial					100%	Persentase PPKS yang direhabilitasi	100%	Persentase PPKS yang direhabilitasi	100%	311,363,300	463,000,000			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					100%	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	223,325,800	313,000,000			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	474 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	474 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	474 Orang	81,155,000	100,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	528 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	45,445,000	50,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	72 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	57,902,400	70,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
3	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	7 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	12,075,000	15,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
4	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	-	40,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
5	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang	9,963,400	10,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
6	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	-	8,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
7	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	4 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	6,900,000	10,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
8	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	5 Orang	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	5 Orang	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	5 Orang	9,885,000	10,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

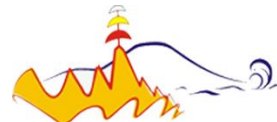
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					100%	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	88,037,500	150,000,000			
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0 Orang	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0 Orang	-	50,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	27 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	27 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	27 Dokumen	88,037,500	100,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					100%	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	224,822,000	280,000,000			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					100%	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	224,822,000	280,000,000			
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	5 Orang	Jumlah Keluarga Penerima Man faat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Keluarga Penerima Man faat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	27,020,000	40,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	05	2.02	06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	5 Orang	Jumlah Keluarga Penerima Man faat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Keluarga Penerima Man faat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	102,520,000	120,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	05	2.02	08	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang direhabilitasi	12 Bulan	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	95,282,000	120,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06			Program Penanganan Bencana					100%	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100%	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100%	427,564,900	565,000,000			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					100%	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	361,883,100	530,000,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	122,683,100	200,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	93,490,000	150,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	1 unit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	76,000,000	100,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	30 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25,690,000	30,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	08	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100 Orang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	44,020,000	50,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					100%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	65,681,800	35,000,000			
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	55 Orang	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	55 Orang	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	55 Orang	65,681,800	35,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					100%	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	15,290,100	20,000,000			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100%	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	15,290,100	20,000,000			
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Bulan	15,290,100	20,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
JUMLAH															4,062,868,932.23	5,048,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2027	Indikator kinerja		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)

BAB V



PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 kami susun dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanggamus yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah maupun nasional.

Akhirnya semoga Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi dinas terkait, organisasi sosial masyarakat, LSM dan masyarakat luas di Kabupaten Tanggamus dalam mengacu pembangunan di semua sektor secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

